

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TOMOHON

Revanli Cristian Mantiri¹, Frida M. Sumual²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

email: 20304069@unima.ac.id

Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah di dinas lingkungan hidup Kota Tomohon. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sumber data yaitu kepala dinas lingkungan hidup kota tomohon, kepala bidang pengelolaan sampah, B3 dinas lingkungan hidup kota tomohon dan kepala bidang keuangan dinas lingkungan hidup kota tomohon. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Penyajian data, Reduksi Data Dan Kesimpulan, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah di dinas lingkungan hidup Kota Tomohon sudah sesuai dengan PSAP No 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penerapan, Akuntansi Lingkungan, Pengelolaan Limbah

Abstract : *The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of environmental accounting in waste management at the Environmental Service of Tomohon City. This research uses a qualitative descriptive method. Data sources are the head of the Environmental Service of Tomohon City, the head of the Waste Management Division, the B3 (hazardous and toxic waste) officer of the Environmental Service, and the head of the Finance Division of the Environmental Service. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results indicate that the implementation of environmental accounting in waste management at the Environmental Service of Tomohon City complies with PSAP No. 71 of 2010.*

Keywords: *Implementation, Environmental Accounting, Waste Management*

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan peningkatan populasi, aktivitas ekonomi, dan perubahan tata guna lahan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan adalah pengelolaan limbah yang efektif dan akuntabel. Limbah produksi seringkali dialami perusahaan merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Pertiwi (2021). Dampaknya bagi lingkungan hidup adalah segala perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup, baik merugikan maupun menguntungkan, yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan hidup dan organisasi. Setiawan (2024). Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang besar dan sangat penting untuk diperhatikan. Saat ini, kesehatan lingkungan tidak dapat dihindari dan disangkal bahwa telah mengalami kerusakan. Hadi dalam (Naira, Putri, and Marpaung 2024)

Akuntansi lingkungan muncul sebagai alat penting yang memungkinkan organisasi publik dan swasta untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya dan kewajiban yang terkait dengan aktivitas lingkungan. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntansi lingkungan membantu memperlihatkan alokasi sumber daya untuk program pengelolaan limbah, menghitung biaya penanganan limbah berbahaya dan beracun (B3), serta menilai dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan sumber daya. Standar akuntansi sektor publik, seperti PSAP No. 71 Tahun 2010, memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan mengungkapkan kewajiban lingkungan, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan dan pencadangan sumber daya keuangan untuk

tindakan remedial. Dengan diterapkannya akuntansi lingkungan, perusahaan dapat mengontrol limbah produksi yang dikeluarkan agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar perusahaan, Safitri and Sari (2024). Biaya pengelolaan lingkungan harus diperhitungkan dengan bijak, sehingga dana yang dialokasikan proporsional. Ridwan et al. (2022). *Green accounting* merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Sahrir et al. (2024)

Kota Tomohon sebagai salah satu kota di Sulawesi Utara mengalami dinamika perkembangan perkotaan yang mempengaruhi produksi dan komposisi limbah. Dengan meningkatnya kegiatan perdagangan, pariwisata, serta pertumbuhan pemukiman, tantangan pengelolaan limbah menjadi semakin kompleks. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon memegang peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi lingkungan telah mendukung fungsi tersebut, apakah praktik yang berjalan selaras dengan standar yang berlaku, dan bagaimana hambatan operasional maupun administratif memengaruhi efektivitas pengelolaan limbah. Selain itu ada juga permasalahan lain bahwa instansi tersebut belum menerapkan akuntansi lingkungan. Pada identifikasi biaya-biaya untuk pengelolaan lingkungan dalam hal ini mereka tidak mengidentifikasi biaya lingkungan menurut standar akuntansi keuangan. Pada tahap pengakuan biaya lingkungan menunjukkan tidak sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Mereka belum dan tidak melakukan pengukuran yang sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan. dan juga di temui mereka belum melakukan penyajian dan pengungkapan terkait biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan mereka

Permasalahan yang muncul pada praktik pengelolaan limbah di berbagai daerah sering kali berkaitan dengan keterbatasan data kuantitatif mengenai volume dan jenis limbah, ketidakjelasan penetapan biaya pengelolaan, serta kurangnya integrasi antara unit teknis pengelolaan limbah dengan unit keuangan. Selain itu, pencatatan kewajiban lingkungan, alokasi biaya penanganan B3, dan pelaporan yang transparan masih menjadi tantangan bagi banyak instansi pemerintah daerah. Analisis terhadap praktik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon akan memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana penerapan akuntansi lingkungan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dalam dalam Pengelolaan Limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi akuntansi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi (Sendow, Manengkey Dan Kambey, 2020). Sedangkan menurut Paputungan K, Kawatu Dan Wuryaningrat (2021). Akuntansi adalah proses yang menyangkut angka sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Wongkar, Senduk Dan Tanor (2021). Angka dari satu sistem informasi akuntansi dapat memprediksi masa depan perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut (Pinontoan, Kantohe Dan Karundeng, 2023). Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif kepada perusahaan.

Pengertian Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan biaya lingkungan yang timbul akibat kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Jaya, 2023). Menurut Suyudi Permana Dan Suganda (2021), Akuntansi lingkungan adalah kegiatan pencatatan dan pengidentifikasian biaya yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan Menurut (Nuw, 2023), Akuntansi lingkungan adalah alat komunikasi manajerial untuk untuk pengambilan keputusan.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Paragraf 14 tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Neraca (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Kerangka ini adalah dokumen ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman utama bagi praktisi akuntansi, membantu menyelesaikan masalah praktis dan mengembangkan standar baru. Tujuan utama kerangka dasar adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemakai umum, seperti investor, kreditor, dan regulator, untuk membuat keputusan ekonomi.

Pengelolaan Limbah

Menurut Vina Amelia Rifanti (2023), konsep tentang pengelolaan limbah sebagai berikut (1) reduksi limbah, (2) Produksi Limbah (3) Produksi bersih (4) pengelolaan kualitas lingkungan (5) pengelolaan kuantitas.

Tahapan Pengelolaan Limbah

- (1) Pemilihan Dan Pada Sumber
- (2) Pengumpulan
- (3) Pemisahan Limbah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. yang dilaksanakan pada Dinas lingkungan hidup kota Tomohon. Instrumen dalam penelitian ini yakni peneliti sendiri. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Rencana keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan akuntansi lingkungan dalam dalam Pengelolaan Limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di dinas lingkungan hidup kota tomohon mengenai klasifikasi limbah B3 menurut kadis DLH kota tomohon klasifikasi limbah B3 yaitu limbah padat, cair dan limbah medis.

Tabel 1
Data Limbah B3

No	Data Sampah B3	Tahun	
1	Cair (Oli Bekas)	13.000	22.456,76
2	Padat	20.000	28.145,50
3	Medis	1.647,44	6.670,94
4	E-Waste	33.184,78	30.785,46

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di olah 2025.

Identifikasi Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di dinas lingkungan hidup kota tomohon mengenai klasifikasi limbah B3 menurut kadis DLH kota tomohon yakni pada perusahaan yang terdaftar di DLH kota tomohon saja.

Tabel 2
Identifikasi Biaya Lingkungan

No	Identifikasi Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan	Identifikasi Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
1	Biaya Pencegahan Lingkungan	Belanja Bahan Bahan Kimia Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumnas Belanja air
2	Biaya Deteksi Lingkungan	Belanja Jasa pemeriksaan air bersih Belanja jasa pemeriksaan sampel limbah
3	Biaya Kegagalan Internal Lingkungan	Belanja pemeliharaan pengurusan septitank Belanja pemeliharaan WC
4	Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan	

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di Olah 2025

1. Pengakuan Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan perbandingan agar mudah di pahami pengakuan biaya lingkungan menurut KDLP dengan pengakuan biaya lingkungan menurut Dinas lingkungan hidup kota tomohon.

Tabel 3
Perbandingan Biaya Lingkungan Menurut KDPLK dengan Pengakuan Biaya Lingkungan Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup

Pengakuan menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan	Pengakuan menurut Dinas Lingkungan Hidup
Beban diakui dalam laporan laba rugi apabila manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban dapat diukur dengan anda	Belum adanya pengkategorian terkait aktivitas pengelolaan lingkungan sehingga kegiatan yang dapat mempengaruhi penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban tidak dapat diukur secara andal.

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di Olah 2025

2. Pengukuran Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan perbandingan pengukuran biaya lingkungan menurut Menurut KDPPLK dan Menurut Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4
Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan Menurut KDPPLK dan Menurut Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan	Pengakuan menurut Dinas Lingkungan Hidup
Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan biaya historis, biaya kini (current cost), nilai realisasi/penyelesaian, dan nilai sekarang	Pengukuran biaya secara umum diukur berdasarkan biaya historis, akan tetapi biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan lingkungan belum diukur secara historis karena biaya lingkungan belum diakui sebagai objek.

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di Olah 2025

Penyajian Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan Menurut Dinas Lingkungan Hidup Dan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 5
Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan Menurut Dinas Lingkungan Hidup Dan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyajian Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)	Penyajian Menurut Dinas Lingkungan Hidup
Penyajian beban disajikan pada Laporan Operasional yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.	Biaya lingkungan dicatat dan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban pemeliharaan.

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di Olah 2025

3. Pengungkapan Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti membandingkan Pengungkapan Biaya Lingkungan Antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Tabel 6
Perbandingan Pengungkapan Biaya Lingkungan Antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

Pengungkapan menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan	Pengakuan Menurut Dinas Lingkungan Hidup
Belum adanya pernyataan tentang pengungkapan tambahan terkait lingkungan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)	Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengungkapan mengenai biaya lingkungannya, selain itu tidak adanya pengungkapan mengenai biaya lingkungan yang dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon di Olah 2025

Setelah melakukan perbandingan yang dilakukan menggunakan teori Hansen dan Mowen untuk mengidentifikasi biaya lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, membandingkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), dan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah untuk melihat Dinas Lingkungan Hidup dalam pengakuan dan pengukuran biaya lingkungannya. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari setiap perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pembahasan

Identifikasi Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Susanto (2022) Hal pertama ketika perusahaan menentukan biaya administrasi eksternal yang mungkin dikeluarkan dalam menjalankan bisnisnya adalah menentukan dampak negatif dari suatu peristiwa ekonomi, seperti rumah sakit yang melakukan kegiatan pelayanan pasien menghasilkan berbagai pemborosan yang pasti akan terjadi. dampak lingkungan dan kesehatan yang negatif sehingga diperlukan tindakan penanganan khusus. Identifikasi merupakan tahapan awal dalam siklus akuntansi, identifikasi membantu dalam mengkategorikan berbagai transaksi. Dinas Lingkungan Hidup dalam mengidentifikasi biaya untuk pengelolaan lingkungannya diperlukan sebagai biaya umum, Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan perlakuan khusus terhadap biaya tersebut. Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat dilihat yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan tahun 2024 untuk pengelolaan lingkungannya data tersebut merupakan hasil dari penelusuran dokumen yang peneliti lakukan pada hasil meminta data. Kemudian peneliti melakukan perbandingan menurut hasil data yang ditemukan dengan teori Hansen dan Mowen. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengidentifikasian menurut teori Hansen dan Mowen. Pada tabel 4.2 juga menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup tidak mengeluarkan biaya untuk kegagalan eksternal lingkungan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak sampai tahap melepaskan limbah atau sampah B3. Melainkan hanya mengirim ke Pihak Ketiga untuk di proses lebih lanjut disana.

Pengakuan Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Yanto dalam Pertiwi, Siska Ayu Intan (2021) elemen- elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencegah lingkungan dari pencemaran dapat di akui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan pedoman tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan atau beban. Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 82 tahun 2015, pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyertakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang. Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 83 tahun 2015, menyatakan bahwa pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ,Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari/ke dalam perusahaan, dan Pos tersebut mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan hasil penelitian pengakuan Dinas Lingkungan Hidup mengakui pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual dimana Dinas Lingkungan Hidup mencatat beban sesuai dengan masa manfaatnya. Peneliti melakukan perbandingan mengenai pengakuan biaya yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan (KDPPLK), biaya secara umum yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup tela mengikuti kaidah penyusunan menurut KDPPLK.

Pada tabel 4.3 dapat diketahui Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengakuan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) tersebut karena tidak adanya pengategorian terkait aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan sehingga penurunan asset belum dapat diukur secara andal seperti yang dijelaskan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa Dinas lingkungan Hidup belum melakukan pengakuan biaya lingkungan sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Pengukuran Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Sampai saat ini pengukuran terkait dengan biaya lingkungan belum ditetapkan standar pengukurannya. Sehingga pengukuran biaya lingkungan lebih berdasarkan pada kebijakan yang ada di suatu perusahaan. Hal ini diungkapkan pula dalam Mulyani dalam Safitri and Sari (2024) "Walaupun masih belum ada standar pengukuran mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya pengelolaan limbah) maka pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Pengukuran dimaksud sebagai penentu angka atau satuan satuan pengukuran terhadap suatu objek agar terdapat satu pemahaman mengenai nilai objek tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dalam mengukur biaya terkait pengelolaan lingkungannya menggunakan satuan moneter berdasarkan pada biaya historis, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan realisasi anggaran periode sebelumnya sebagai pengukur untuk rancangan anggaran untuk periode selanjutnya. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengukuran biaya lingkungan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, hal ini dikarenakan pada tahap pengukuran tidak adanya objek yang dapat digambarkan sifat atau ciri yang dikandungnya.

Penyajian Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. Biaya yang timbul dari pengelolaan limbah disajikan bersama-sama dengan biaya gaji, biaya retribusi air, bahan bakar, pemeliharaan mesin dan instalasi, dan biaya lain sejenisnya kedalam sub bagian instalasi limbah cair, instalasi limbah padat, (Nilasari 2022). Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyatakan penyajian beban disajikan pada laporan operasional yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dinas Lingkungan Hidup menyajikan biaya lingkungan dengan biaya-biaya sejenis sebagai biaya pemeliharaan pada biaya operasional mereka, tidak ada penyajian secara khusus mengenai biaya untuk pengelolaan lingkungan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan penyajian terkait biaya lingkungan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) karena biaya lingkungan disajikan pada laporan operasional sebagai biaya lingkungan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) karena biaya lingkungan disajikan pada Laporan Operasional sebagai biaya pemeliharaan.

Pengungkapan Biaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Vina Amalia Rifanti (2023). Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengungkapan mengenai biaya lingkungannya karena biaya lingkungan bergabung dengan biaya sejenis sebagai biaya pemeliharaan pada laporan operasional, dan juga tidak terdapat pengungkapan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan pada Catatan atas Laporan Akuntansi (CaLK) Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mengungkapkan biaya untuk

pengelolaan lingkungannya, pada Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup hal yang diungkapkan diantaranya yaitu kebijakan atau aturan yang digunakan rumah sakit serta stick opname. Sedangkan pada perusahaan yang di tangani DLH kota tomohon, Pengungkapan transaksi terkait kegiatan pengelolaan limbah pabrik sangat penting dilakukan agar pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang berguna, terutama dalam laporan keuangan yang disediakan. mengenai biaya pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pihak pabrik dan biaya – biaya tersebut harus diungkapkan. Biaya pengelolaan limbah diungkapkan ke dalam laporan .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon: dapat disimpulkan bahwa instansi tesebut belum menerapkan akuntansi lingkungan. Pada identifikasi biaya- biaya untuk pengelolaan lingkungan dalam hal ini mereka tidak mengidentifikasi biaya lingkungan menurut standar akuntansi keuangan Pada tahap pengakuan biaya lingkungan menunjukkan tidak sesuai dengan Kerangka Dasra Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). mereka belum dan tidak melakukan pengukuran yang sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan. dan juga di temui mereka belum melakukan penyajian dan pengungkapan terkait biaya- biaya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaya. 2023. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Ptpn Xi Pabrik Gula Prajekon Kabupaten Bondowoso).” *Jea17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1–69.
- Jenny D, Aprindah, Ilham Wahyudi, And Rita Friyani. 2023. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengolahan Limbah (Studi Pada Pt. Bahari Gembira Ria Sungai Gelam Pks Ladang Panjang Muaro Jambi).” *Jambi Accounting Review (Jar)* 3 (3): 226–34. <https://doi.org/10.22437/Jar.V3i3.14660>.
- Kusnan Paputungan, Novita A. Saleh, Freddy Samuel Kawatu, and Nikolas Fajar Wuryaningrat. 2021. “Analisis Perbandingan Kinerja Belanja Kabupaten Minahasa Dan Kota Tomohon.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 1 (3): 78–87. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.653>.
- Naira, Syalwa, Eka Putri, And Rizki Aisyah Marpaung. 2024. “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pt Sinar Sostro.” *Jurnal Riset Akuntansi* 2 (1): 65–71. <https://doi.org/10.54066/Jura-ltb.V2i1.1305>
- Nuw, Yohanes Calvin Adriano Goa. 2023. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 11 (1): 9–21. <https://doi.org/10.35508/Jak.V11i1.10074>.
- Pertiwi, Siska Ayu Intan. 2021. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Semboro).” *Skripsi*, 1–20.
- Pinontoan, Tesalonika Sefanya, Meidy Santje Selvy Kantohe, and Frandy Karundeng. 2023. “Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 4 (1): 187–95. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4251>.
- Sahrir, Sahrir, Sultan Sultan, Sofyan Syamsuddin, And Riyanti Riyanti. 2024. “Analisis Perspektif Akuntansi Lingkungan Pt Sumber Graha Sejahtera Luwu.” *Jesya* 7 (1): 692–702.

<https://doi.org/10.36778/Jesya.V7i1.1417>.

- Safitri, Anni, And Fushilat Sari. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Pt Panggung Jaya Indah." *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 (1). <https://doi.org/10.56696/Jaka.V3i1.6640>.
- Setiawan, Roni. 2024. "Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Hal Pengelolaan Limbah Produksi Pada Perusahaan Pengalengan Ikan Tuna Pt. Aneka Tuna Indonesia." *Jura: Jurnal Riset Akuntansi* 15 (3): 360. <https://doi.org/10.32400/Gc.15.3.29007.2020>.
- Sendow, Sendi, James Manengkey, and Anita Kambey. 2020. "Analisis Penerapan Sak Etap Pada Koperasi Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 1 (2): 25–29. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.374>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cet. Ke-Dua. Bandung : Alfabeta
- Susanto, Y Karunia. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) Pada Pengelolaan Limbah Di Rumah Sakit Daerah Balung." *Ekonomi Dan Bisnis*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/16808/%0ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/16808/1/Yesy> Karunia Susanto.Pdf.
- Suyudi, Muhammad, Diah Permana, And Diki Suganda. 2021. "Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 4 (2): 188–216. <https://doi.org/10.35837/Subs.V4i2.1048>.
- Vina Amalia Rifanti. 2023. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember." *Ekonomi Dan Bisnis* 4 (1): 1–23.
- Wongkar, Don Leonardo, Ventje Senduk, and Linda Tanor. 2021. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2 (1): 1–7. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.630>.